

Aset Perlu Ditata dengan Baik

PUTUSSIBAU. Salah satu kelemahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten (Pekab) Kapuas Hulu ketika dilakukan audit BPK pada tahun 2010 yang lalu adalah belum tersajinya laporan aset daerah dengan baik. Ini disebabkan belum tertibnya pencatatan, administrasi dan mutasi pada setiap SKPD.

"Hal ini tentunya memberikan konsekuensi atas opini BPK terhadap laporan keuangan Pekab Kapuas Hulu. Ke depannya saya harap kepada bapak ibu sekalian dapat melaksanakan penatausahaan dan tertib administrasi dalam pengelolaan aset daerah," kata Agus Mulyana SH, Wakil Bupati Kapuas Hulu, saat membuka Diklat Penatausahaan aset bagi pengurus dan penyimpanan di lingkungan Pekab Kapuas Hulu, Senin (10/10) pagi di Gedung Kopri Putussibau.

Peserta Diklat diikuti 48 orang. Mereka seluruhnya merupakan PNS daerah yang mempunyai tugas sebagai pengurus dan penyimpan barang di masing-masing SKPD. Diklat ini berlangsung dari tanggal 10-14 Oktober.

Dikatakan Agus, dengan Diklat ini diharapkan pada tahun 2011 Kabupaten Kapuas Hulu mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK atas laporan keuangan. Kalau pada tahun sebelumnya Kapuas Hulu mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Namun Kapuas Hulu mendapatkan peringkat kedua terbaik laporan keuangan se-Kalbar.

Salah satu kriteria laporan keuangan Pekab yang harus dipenuhi untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK adalah tertib penatausahaan dan pengelolaan aset daerah. Baik tertib administrasi, inventarisasi maupun laporan.

"Untuk itu, kompetensi SDM di bidang penatausahaan dan administrasi aset menjadi sebuah keharusan guna menunjang keakuratan administrasi aset. Hal ini merupakan tanggungjawab kita bersama selaku aparatur pemerintah daerah," imbuhnya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidang penatausahaan aset, Pekab Kapuas Hulu melalui bidang kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, mengadakan Diklat ini.

Agar seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan barang dapat memahami penatausahaan barang daerah dengan baik.

Sehingga dapat melakukan pencatatan dan pelaporan barang daerah secara akurat serta tepat waktu. Sehingga permasalahan di mana belum tersajinya laporan aset daerah dengan baik dapat teratasi. (aRm)